



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**

KANTOR & LABORATORIUM : JL. CIDENG INDAH NO.236 A
KEDAWUNG CIREBON TELP/FAX (0231)-248857
LAMAM www.kkp.go.id SUREL op.skipmcirebon@kkp.go.id

Nomor : B.310/SKIPM.CRB/TU.210/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Yth. Sekretaris BPPMHKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan II Tahun 2025, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 Triwulan II atas capaian indikator kinerja yang pelaksanaan kegiatan/komponennya telah diselesaikan selama periode Triwulan II Tahun 2025. Berikut kami lampirkan Laporan Kinerja beserta lampirannya berupa Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun KIPM Cirebon



Ditandatangani
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM CIREBON

TRIWULAN II

2025



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon (LKj Stasiun KIPM Cirebon) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja setiap entitas atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam PK dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Stasiun KIPM Cirebon ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan masyarakat dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Landasan penyusunan LKj triwulan ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 beserta realisasinya. Secara umum, pada Tahun 2025 Triwulan II, seluruh target kinerja utama yang ditetapkan berhasil dicapai dengan kategori baik.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai media akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi, serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Cirebon, 10 Juli 2025
Kepala Stasiun KIPM Cirebon



R. Rudi Barmara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Cirebon dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Stasiun KIPM Cirebon mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 15 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Cirebon dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Pada Triwulan II Tahun 2025, telah diukur capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 8 IKU. Berdasarkan pengukuran kinerja dalam Aplikasi Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja per Triwulan II Tahun 2025 adalah 114,22%. Secara keseluruhan nilai kinerja organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2025 sebesar 114,22% atau masuk dalam kriteria Istimewa (biru), yaitu sebanyak 8 IKU yang harus diukur telah mencapai/melebihi target, sebagaimana pada **Tabel 1** berikut.

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4.213.825.089,00 atau 49,91% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp8.442.910.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp4.229.084.911,00 atau 50,09%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Juni yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 100.

Tabel 1 . Nilai capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Cirebon
Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
					2025	TW II	TW II		s/d TW II	s/d TW II	
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						113,67			113,67	
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	99	100	101	198	200	101
S.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar										
S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						114,76			114,76	
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	85	100	118	85	100	117,7
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	75	83,84	112	75	83,84	111,8

IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	85	100	118	170	200	117,7
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	76	100	120	76	100	120
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	93,88	107	88	93,88	106,7

Keterangan : NKO verifikasi = 114,22%
Tingkat capaian kinerja dibatasi sampai dengan 120% (Sumber : aplikasi kinerjaku.kkp.go.id)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Arah Kebijakan	2
III. Dasar Hukum	3
IV. Tugas dan Fungsi	3
V. Agenda SKIPM Cirebon	4
VI. Dasar Pengukuran Kinerja	4
VII. Tujuan Pengukuran Kinerja	5
VIII. Ruang Lingkup	5
IX. Waktu Pengukuran Kinerja	5
X. Metodologi Pengukuran Kinerja	5
XI. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
I. Rencana Strategis	7
II. Rencana Kinerja Tahunan	9
III. Penetapan Kinerja Tahun 2025	10
IV. Program dan Kegiatan Tahun 2025	11
V. Rencana Aksi Pencapaian IKU	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
I. Pengelolaan Kinerja	13
II. Capaian Kinerja	14
III. Realisasi Rencana Aksi	26
IV. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	27
V. Analisis Capaian Kinerja	27
BAB IV PENUTUP	29
I. Kesimpulan	29
II. Permasalahan	29
III. Langkah Perbaikan	30
LAMPIRAN	31

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Cirebon wajib melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun berjalan untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Cirebon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan motivasi dalam peningkatan kinerja Stasiun KIPM Cirebon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Stasiun KIPM Cirebon dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Para Katimja, JF tertentu dan JF Umum.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Stasiun KIPM Cirebon saat ini berjumlah 41 orang pegawai terdiri dari 28 PNS dan 13 Tenaga Kerja Kontrak (PPNPN). Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Cirebon juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Struktur organisasi Stasiun KIPM Cirebon tergambar sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Cirebon

II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM CIREBON

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Cirebon disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan dan strategi SKIPM Cirebon sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPPMHKP untuk mewujudkan tujuan organisasi dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian 5 Kebijakan Ekonomi Biru dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan (prioritas), yaitu :

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut;
2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
3. Mengembangkan Budidaya Ikan Laut, Tawar, dan Payau yang Berkelanjutan;
4. Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
5. Penanganan Sampah Plastik di Laut melalui Bulan Cinta Laut (BCL).

Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT dari BPPMHKP bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Adapun strategi Stasiun KIPM Cirebon dalam rangka mendukung kebijakan KKP dan tugas fungsi BPPMHKP, yaitu :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kualitas dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

III. DASAR HUKUM

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

IV. TUGAS - FUNGSI

Sampai dengan saat Laporan Kinerja Triwulan II disusun, Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkup BPPMHKP – KKP belum terbit, sehingga Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan penerapan sistem manajemen mutu.

V. AGENDA STASIUN KIPM CIREBON

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang mendukung kebijakan dan program KKP di lingkup Stasiun KIPM Cirebon adalah dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan (Pusat Mutu Produksi Primer dan Pusat Mutu Pascapanen).
2. Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Dukungan manajerial dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel.

VI. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 032.13.2.649732/2025, tanggal 2 Desember 2024.
6. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan Kepala BPPMHKP pada tanggal 31 Januari 2025.

VII. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

VIII. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Stasiun KIPM Cirebon dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Kepala BPPMHKP.

IX. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang diukur : April s.d. Juni 2025
2. Waktu pengukuran : 1 s.d. 10 Juli 2025

X. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 30 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (Matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2025.
2. Pemantauan atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU Tahun 2025.

XI. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan laporan merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan realisasi rencana aksi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

- d. Bab IV – Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/ permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

Sejalan dengan dinamika organisasi yang ada di KKP, Renstra BPPMHKP menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk menyusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis Matriks Peran Hasil (MPH) di lingkungan BPPMHKP dan KKP.

Visi KKP untuk mendukung visi Presiden "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Adapun visi – misi BPPMHKP dan Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Renstra dan turunannya, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Stasiun KIPM Cirebon yang mengacu pada Visi KKP adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

2. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 dari 4 Misi KKP, yaitu: (1) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; (2) Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (3) Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan

hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

3. Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT BPPMHKP yang mendukung/bertanggung jawab pada pencapaian agenda prioritas KKP dengan dua dari lima Kebijakan Ekonomi Biru, yaitu (a) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan (b) Mengembangkan Budidaya Air Laut, Tawar, Payau yang Berkelanjutan; dengan tujuan :

- a. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap mutu pangan nasional.
- b. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
- c. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

4. Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 s.d. 2029, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Cirebon dari program yang dilaksanakan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Pada Tahun 2025, mengacu Sasaran Kegiatan BPPMHKP Stasiun KIPM Cirebon menetapkan 3 sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar; dan
- c. Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup **Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan**. Rincian outputnya adalah :

- a. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya (1 produk);
- b. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (60 produk);
- c. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (30 Lembaga);
- d. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (1 produk);
- e. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (15 Lembaga);
- f. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (1 rekomendasi);
- g. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan (1 kegiatan);
- h. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (1 rekomendasi kebijakan);
- i. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (1 lembaga);
- j. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (1 lembaga);
- k. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi (1 produk).

2. Program Dukungan Manajemen

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama Dukungan Manajemen dengan rincian output :

- a. Layanan Umum (1 layanan);
- b. Layanan Perkantoran (1 layanan);
- c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 layanan);
- d. Layanan Manajemen Keuangan (1 layanan);

III. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	70 %
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	70 %
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	1 Lokasi
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	99 %
Kegiatan 2. Manajemen Mutu				
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	75 (nilai)
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	75 (nilai)
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal				
SK 3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	92 (nilai)
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	71,5 (nilai)
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	100 %
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	87 (Indeks)
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	86 (nilai)
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	85 %

		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	76 %
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	70 %
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	88 (nilai)

Sumber : PK yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan Kepala UPT pada Tahun 2025

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN KIPM CIREBON

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan 2 Program/ 3 Kegiatan, dengan rincian indikator kinerja komponen kegiatan, antara lain :

1. Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar
2. Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
3. Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan
4. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
5. Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan
6. Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan
7. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan
8. Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
9. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
10. Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi
11. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
12. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
13. Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir
14. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor

15. Nilai Kinerja Anggaran
16. Indeks Profesionalitas ASN
17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
18. Nilai PM SAKIP
19. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP
20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
21. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK
22. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
23. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

V. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Cirebon telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai IKU dan target waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun KIPM Cirebon dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi berbasis *website* www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Cirebon Nomor B. 27/SKIPM.CRB/KP.440/I/2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Cirebon.

Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 3. Rentang penilaian capaian kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Sesuai dengan pendekatan MPH, Sasaran Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui capaian **15 IKU** dengan target yang ditentukan.

II. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan dari April – Juni 2025. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025, target Sasaran dan IKU yang diukur menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam periode s.d Triwulan II Tahun 2025. Target Sasaran dan IKU sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan IKU/IK yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
					2025	TW II	TW II		s/d TW II	s/d TW II	
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							113,67		113,67	
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	99	100	101	198	200	101

S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							114,76			114,76	
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	85	100	118	85	100	117,7	
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	75	83,84	112	75	83,84	111,8	
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	85	100	118	170	200	117,7	
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	76	100	120	76	100	120	
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	93,88	107	88	93,88	106,7	

Keterangan: Nilai Skor Kinerja Organisasi Triwulan I = 114,22%

* Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Seluruh IKU/IK target pada Triwulan II Tahun 2025 tersebut, telah dilakukan pengukuran baik secara manual (LCK) maupun menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id). Pada Tabel 4, nilai capaian kinerja IKU Triwulan II mencapai nilai **114,22%** secara keseluruhan (8 IKU), ditunjukkan melalui skor kinerja sebesar **114,22%** yang masuk dalam kriteria **Istimewa** (biru). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa

capaian kinerja atas 8 dari 15 IKU yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan (hijau/biru).

Capaian kinerja yang dihasilkan dari kinerja masing – masing IKU, mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan sasaran tersebut. Capaian kinerja masing – masing Indikator dari masing-masing Sasaran dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut :

SK 01
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

IKU 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Target persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dalam satu tahun anggaran sebesar 70% dengan rincian target sertifikasi CBIB pada Pembudidaya ikan sebanyak 3 sertifikat, CPIB pada pembenihan ikan sebanyak 3 sertifikat, CPPIB sebanyak 2 sertifikat, CPOIB dan CDOIB sebanyak 2 sertifikat, dan CPIB pada kapal perikanan sebanyak 20 sertifikat.

$$\text{Formula perhitungan IKU} = \% X = (A+B+C+D+E+F)/xn * 100\%$$

Keterangan :

% X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian IKU 1 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan *)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70%	70%	100%	143% (~ 120%)	100%	143% (~ 120%)

Sumber : Aplikasi siapmutu.kkp.go.id

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada bulan April s.d. Juni 2025 persentase sertifikat yang diterbitkan sebesar 100% dari total 2 permohonan dengan rincian 2 permohonan permintaan sertifikasi mutu lingkup produksi primer oleh pengguna jasa PT Indonusa Yudhaperwita di Indramayu (CBIB) dan PT Pasifik Bumi Samudera di Pangandaran (CPIB Kapal) telah memenuhi persyaratan dan dapat diterbitkan Sertifikat mutu. Oleh karena itu atas kedua unsur pembentuk tersebut, persentase hasil kelautan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Cirebon adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$, maka capaian IKU 1 terhadap target triwulan II sebesar $= (100/70) \times 100\% = 143\%$ (dengan konversi dalam aplikasi kinerjaku menjadi maksimal 120%).

Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 120% tersebut disebabkan meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi/sosialisasi pemahaman sistem jaminan mutu sebagai syarat dasar dalam usaha bidang perikanan dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Produksi Primer triwulan II sebesar Rp26.258.400,00 atau 48,00% dari pagu revisi senilai Rp54.700.000,00

IKU 2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Adapun target persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon selama satu tahun anggaran ini sebesar 70%, dengan rincian : target sertifikasi HACCP dan SKP sebanyak 60 sertifikat.

Formula perhitungan IKU ini adalah :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

dengan keterangan :

% X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn= Jumlah dari unsur pembentuk

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU 2 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan *)
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	70%	70%	100%	143% (~ 120%)	100%	143% (~ 120%)

Sumber : Aplikasi Honest dan SKP online

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada bulan April s.d. Juni 2025 persentase SKP yang diterbitkan sebesar 22 sertifikat atau 100% dari total 22 permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dapat diterbitkan SKP, sedangkan untuk Sertifikasi HACCP yang terbit pada triwulan II sebanyak 5 dari total 5 permohonan untuk dilakukan perpanjangan. Oleh karena itu atas kedua komponen tersebut, persentase hasil kelautan perikanan pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah 100%, maka capaian IKU 2 sebesar $(100 / 70) \times 100\% = 143\%$ (dikonversi aplikasi kinerjaku menjadi ~120%).

Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 120% tersebut disebabkan meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi/sosialisasi pemahaman sistem jaminan mutu sebagai syarat dasar dalam usaha bidang perikanan dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Pascapanen triwulan II sebesar Rp42.238.000,00 atau 96,29% dari pagu revisi senilai Rp43.867.000,00.

IKU 4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Formula perhitungan rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah (x) % =

$$\frac{A - B}{A}$$

dengan keterangan :

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Periode pengukuran IKU 4 diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian IKU 4 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan *)
Rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99%	99%	100%	101%	100%	101%

Sumber : Laporan operasional ekspor hasil perikanan triwulan II.

*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Jumlah permohonan sertifikasi ekspor hasil perikanan pada triwulan II sebanyak 402 HC dan selama April s.d. Juni tidak terdapat notifikasi kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor, baik negara mitra maupun negara non mitra sehingga realisasi persentase ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 100% dari target 99%. Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 101% tersebut disebabkan kehati-hatian

eksportir dalam memenuhi persyaratan ekspor terkait penanganan produk oleh negara tujuan ekspor baik secara administrasi maupun *quality controll* produk. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan ekspor baik secara administrasi maupun *quality* produk.

Dalam rangka pelayanan jasa HC mutu (kegiatan ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon dan mendukung pencapaian IKU 4 tersebut, tidak tersedia alokasi anggaran.

SK 03
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan
Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian/ Lembaga dan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. IKPA mengukur tiga aspek utama: kualitas perencanaan anggaran untuk mengukur seberapa sesuai pelaksanaan anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan; kualitas pelaksanaan anggaran untuk mengukur seberapa efektif dan efisien anggaran tersebut direalisasikan; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk mengukur seberapa baik output yang dihasilkan dari pelaksanaan anggaran tersebut.

Cara menghitung IKPA dengan (1) identifikasi Indikator seperti revisi DIPA, penyerapan anggaran; (2) menentukan bobot seperti penyerapan anggaran memiliki bobot 20%, dispensasi SPM memiliki bobot 5%; (3) menghitung nilai setiap indikator, seperti untuk penyerapan anggaran, hitung rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan target penyerapan; (4) mengalikan nilai setiap indikator dengan bobotnya; dan (5) menjumlahkan semua hasil perkalian untuk mendapatkan nilai IKPA total. Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi OMSPAN. Periode pengukuran IKU 7 diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian IKU 7 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan *)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	92	92	100%	108,69%	100%	108,69%

Sumber : Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Secara akumulasi, sampai dengan semester 1 TA 2025, nilai IKPA mencapai 100 dari target 92 atau capaian kinerja IKU 7 sebesar 108,69%. Keberhasilan tercapainya target tersebut disebabkan tercapainya kualitas perencanaan anggaran sebesar 100%; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100%; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga seluruh indikator IKPA menjadi optimal. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum dalam rangka mendukung capaian penilaian IKPA Tahun 2025 ini sebesar Rp19.506.395,00 atau 93,78% dari pagu anggaran sebesar Rp20.800.000,00.

IKU 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugastugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU 10 seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Capaian IKU 10 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan *)
IP ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	75	87	83,84	112%	83,84	96%

Sumber : <http://ropeg.kkp.go.id>

Pada semester II ini telah dilakukan pengukuran capaian IKU 10 menggunakan alat bantu berbasis digital <http://ropeg.kkp.go.id> dengan capaian IP ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 83,84 dari target per triwulan II 75,00 sehingga capaian IKU sebesar 112%. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan pro aktifnya pegawai mencari informasi dan meningkatkan kompetensinya sebagai ASN, baik secara luring maupun daring.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Cirebon adalah menyusun rencana peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi secara berkala dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN untuk selalu meningkatkan pendidikan/kompetensinya. Sampai dengan triwulan II, dalam rangka mendukung capaian IKU 10 dan peningkatan kompetensi/ IP ASN lingkup Stasiun KIPM Cirebon, tidak tersedia alokasi anggaran dalam RKA K/L.

IKU 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada SKIPM Cirebon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan/LHP (terbatas pada Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit s.d. triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Stasiun KIPM Cirebon yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan (jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP melalui Laporan Hasil Pengawasan) x 100%. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 12 seperti pada tabel berikut.

Tabel 10 Capaian IKU 12 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	85%	85%	100%	118%	118%	118%

Sumber : Data diolah dari aplikasi SIDAK. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pencapaian IKU dilakukan pada triwulan II dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun KIPM Cirebon dan memanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Hasil tindak lanjut *diupload* dan disampaikan ke Tim PTL Itjen melalui aplikasi pengawasan SIDAK. Sampai dengan triwulan II, Stasiun KIPM Cirebon mampu

mempertahankan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebagai perbaikan kinerja dengan capaian 100% dari target 85% yang ditunjukkan dengan informasi data dalam aplikasi SIDAK. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 118% tersebut disebabkan rekomendasi hasil pengawasan telah 100% ditindaklanjuti secara tuntas untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memperbaiki kinerja pegawai dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan, seperti menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

IKU 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan untuk mengukur IKU 13 Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $(\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP} / \text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}) \times 100\%$. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Perkembangan capaian IKU 13 seperti pada tabel berikut.

Tabel 11 Capaian IKU 13 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan
Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP (%)	76%	76%	100%	131,6% (~120%)	100%	131,6% (~120%)

Sumber : Data dari aplikasi SIRUP. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Realisasi IKU 13 Stasiun KIPM Cirebon pada triwulan II sebesar 100%, sehingga capaian IKU 13 sebesar 132% yang selanjutnya dikonversi oleh aplikasi kinerjaku menjadi 120%, sebagaimana informasi dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025, tanggal 9 Juli 2025, hal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan capaian IKU 120% tersebut disebabkan pasca efisiensi anggaran, PPK segera melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun, sehingga dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP melebihi 100%.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain melakukan upload Rencana Umum Pengadaan UPT (pasca efisien) secara tepat waktu (sebelum jadwal/akhir Juni Tahun 2025). Dalam rangka pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

IKU 15 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan

Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 15 seperti pada tabel berikut.

Tabel 12 Capaian IKU 15 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Realisasi s.d. TW II	% Capaian thdp target tahunan
Survei kepuasan masyarakat lingkup Stasiun KIPM Cirebon (nilai)	88	88	93,88	106,68%	93,88	106,68%

Sumber : <https://taplink.cc/yanblik.setbppmhkp> dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUSAN) dengan alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>

Pada triwulan II telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diprogramkan setiap triwulan menggunakan alat bantu kuesioner berbasis digital (website ptsp.kkp.go.id) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,88 dari target 88,00 sehingga capaian IKU sebesar 107%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 107% disebabkan peningkatan pelayanan publik dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam melayani masyarakat pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan prima. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran untuk alat tulis kantor dan pelayanan publik dalam rangka mendukung capaian IKU 15 ini sebesar Rp4.617.600,00 atau 38,48% dari pagu anggaran sebesar Rp12.000.000,00.

III. REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana

aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dilakukan evaluasi secara periodik, minimal triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana aksi pencapaian perjanjian kerja Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU Tahun 2025 berjumlah sekitar 31 komponen/kegiatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat 8 IKU yang telah mencapai/melampaui target.

IV. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon s.d. Triwulan II TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4.213.825.089,00 atau 49,91% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp8.442.910.000,00 sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp4.229.084.911,00 atau 50,09%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN sebesar 100.

V. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TA 2025 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun KIPM Cirebon telah melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2025 terhadap target kinerja tahun 2025.

Berdasarkan target kinerja Tahun 2025 sebanyak 15 IKU, terdapat 8 IKU yang ditargetkan dilakukan pengukurannya pada triwulan II Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 4. Secara umum, 8 IKU yang dilakukan pengukuran tersebut telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Hasil analisis terbatas terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2025 dengan membandingkan terhadap target setahun pada TA 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” (SK 1) dicapai dengan 3 IKU. Pada triwulan II target IKU yang diukur sebanyak 3 IKU, yaitu :

- IKU 1- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;
- IKU 2- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;
- IKU 4 - Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 101%.

Atas capaian 3 IKU pada triwulan II diketahui bahwa capaian kinerja atas ketiga IKU telah mencapai/melebihi target ($\geq 100\%$) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

2. Sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” (SK 3) dicapai dengan 5 IKU. Pada triwulan II target IKU yang diukur sebanyak 5 IKU, yaitu :

- IKU 7- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 118%;
- IKU 10- Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian 112%;
- IKU 12- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 118%;
- IKU 13- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%; dan
- IKU15- Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerjanya 107%.

Atas capaian 5 IKU tersebut pada triwulan II diketahui bahwa hasil kinerja melebihi target, sehingga kinerja yang telah dihasilkannya dapat dipertahankan/ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Cirebon Triwulan II Tahun 2025 menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Cirebon selama triwulan II Tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan II Tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Manajemen Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **Istimewa**, dengan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (**NPSS**)/Skor Kinerja IKU Triwulan II Tahun 2025 mencapai **114,22**; demikian juga secara keseluruhan IKU sebesar **114,22** atau secara umum capaian kinerja di atas target sehingga kinerja perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Sebanyak 8 dari 15 IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2025, seluruhnya telah mencapai/melebihi target.
3. Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar sebesar Rp4.213.825.089,00 atau 49,91% dari pagu anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp8.442.910.000,00, sehingga sisa anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp4.229.084.911,00 atau 50,09%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN sebesar 100.

II. PERMASALAHAN

Pada proses pencapaian dan pengukuran capaian kinerja selama triwulan II ini tidak ditemukan kendala yang berarti, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tercapainya target 8 IKU yang pengukurannya dijadwalkan pada triwulan II.

III. LANGKAH PERBAIKAN

Stasiun KIPM Cirebon konsisten melakukan komunikasi dan koordinasi (layanan WA maupun komunikasi langsung) dengan Kantor Pusat (BPPMHKP dan Eselon I lainnya di lingkup KKP) dan pihak terkait lainnya (seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon sebagai mitra kerja, Dinas teknis kelautan dan perikanan, dan pengguna jasa UPT).

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Rudi Barmara
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Cirebon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini



Ditandatangani
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN CIREBON

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
	3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	1
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	92
	8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71,5
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
	10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	87
	11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	86
	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	85
	13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	76
	14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	88

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.182.638.973
2.	Manajemen Mutu	124.490.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	202.500.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon Tahun 2025		6.509.628.973

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025

STASIUN KIPM CIREBON



KATA PENGANTAR

Kinerja suatu unit kerja/organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi atas pencapaian yang telah ditargetkan oleh unit kerja tersebut pada periode waktu tertentu. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan unit organisasi di lingkup KKP dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi yang baru terutama di bidang primer dan pasca panen disusunlah revisi rencana aksi kegiatan. Rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerjanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 ini. Kami sangat berkenan jika ada masukan/saran yang membangun dalam rangka perbaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini, dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.



Cirebon, 3 Februari 2025

Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Rudi Barmara', written over a horizontal line.

**R. Rudi Barmara, S.Pi, M.P.
NIP 19690414 199203 1 005**

RENCANA AKSI

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Bulanan														
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan	8,160,000	Sertifikat	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			Sertifikasi CPIB pada Pembenihan	8,160,000	Sertifikat	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Sertifikasi CPPIB	18,720,000	Sertifikat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	18,720,000	Sertifikat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan	87,120,000	Sertifikat	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	30,000,000	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
			Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	43,280,000	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	3 Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Perjalanan dinas pengambilan contoh uji	6,000,000	Laporan	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	
			Biaya uji banding ke laboratorium rujukan	4,100,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
			Belanja bahan dan perlengkapan pengawasan mutu hasil perikanan domestik	14,900,000	Paket	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan														
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Perjalanan investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan	4,680,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI	56,720,000	Sertifikat	53	2	6	10	17	20	23	24	30	40	45	50	53		
				Evaluasi kesesuaian penerbitan HC pada UPI	15,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
2	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Manajemen Mutu	Maintenance ISO 17025	30,500,000	Unit Kerja	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Uji Banding	5,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Uji Profisiensi	4,500,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Kalibrasi Alat Laboratorium	60,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Manajemen Mutu	Reakreditasi ISO 17020	35,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Sertifikasi ISO 9001	25,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	100,800,000	Laporan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2		
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	100,800,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	37,200,000	Laporan	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Perjalanan dinas Peningkatan Kualitas SDM	58,320,000	Orang	6	-	-	-	-	1	1	2	3	4	5	6	6		
				Peningkatan Skill Komunikasi Petugas Pelayanan	67,400,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
Inhouse Training Inspektur Mutu	7,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					
11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi	37,200,000	Dokumen	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan												
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi	37,200,000	Dokumen	4	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
	13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Pengelolaan PBJ	553,316,000	Laporan	7	-	-	1	1	4	4	4	5	5	6	7	7
	14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penilaian Mandiri SAKIP dan Maintenance WBK	14,760,000	Laporan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Bahan Perlengkapan Pelayanan	12,000,000	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan data dan informasi	25,080,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Cirebon, 3 Februari 2025
Kepala SKIPM Cirebon

R. Rudi Barmara, S.Pi., M.P.
NIP. 19690414 199203 1 005

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II**

TAHUN ANGGARAN 2025
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA STASIUN KIPM CIREBON
NKO 114.22%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
					2025	TW II	TW II		s/d TW II	s/d TW II	
S.01	Terseleenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							113,67		113,67	
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	99	100	101	198	200	101
S.02	Terseleenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar										
S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							114,76		114,76	
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	85	100	118	85	100	117,7
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	75	83,84	112	75	83,84	111,8
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	85	100	118	170	200	117,7
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	76	100	120	76	100	120
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	93,88	107	88	93,88	106,7